

# IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBITE PADA PEMERINTAH DESA DUKUHSARI

Dina Ayu Sindiana (192020100025)

Nama Dosen Pembimbing

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

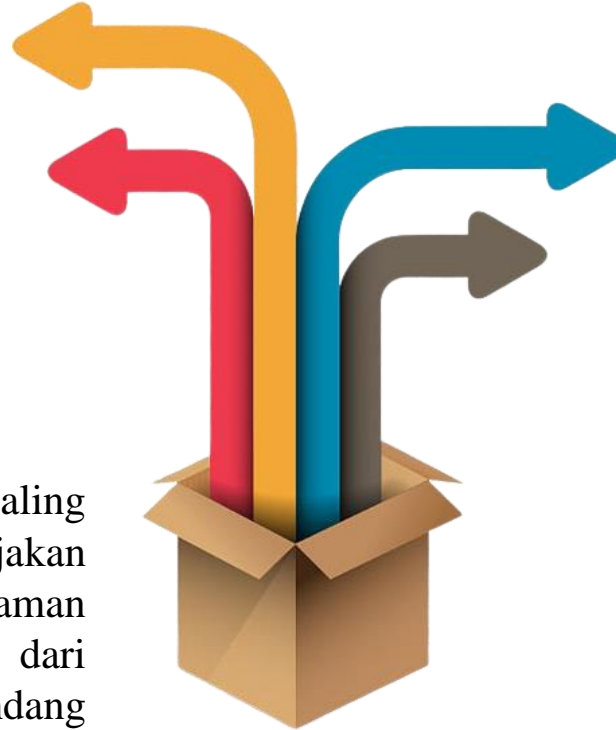
# PENDAHULUAN

## Desa

Desa adalah satu kesatuan penduduk Indonesia yang diatur dengan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI serta batas wilayah guna mempertahankan dari upaya perubahan/pemindahan hal lain, serta kebutuhan penduduk sebagai keberlangsungan hidup yang diakui milik negara.

## Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah kegiatan yang saling berkesinambungan. Implementasi pada kebijakan undang-undang diperlukan karena pada halaman tersebut diharapkan untuk melihat “kesesuaian” dari berbagai faktor penentu keberhasilan undang-undang atau program tersebut.



## Sistem Informasi Desa

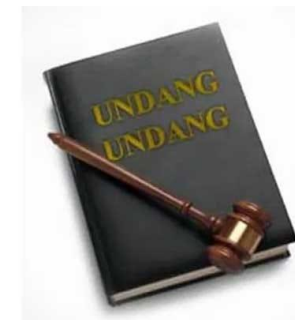
SID ialah bentuk dari bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kawasan desa serta pembangunan desa, dimana kawasan pedesaan yang terintegritas dengan sistem informasi dapat berdampak untuk peningkatan pelayanan publik yang optimal.

## Tujuan Sistem Informasi Desa

Tujuan Sistem Informasi Desa (SID) diantaranya ialah : a). Untuk pemetaan kondisi dan potensi desa (data akurat dan mutakhir), b). Untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. C). Untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan desa

# PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014) yang di dalamnya memuat tentang informasi desa melalui Pasal 86. Sistem Informasi Desa (SID) berisi tentang data desa, berupa data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa maupun pembangunan pada kawasan desa.



Komponen-komponen yang terlibat dalam implementasi kebijakan ialah tujuan dari sebuah kebijakan yang ditentukan, program yang sudah diwujudkan dalam realitas, serta hasil luaran atau (*output*), luaran yang merupakan realitas yang didapatkan berupa *outcome*, manfaat, serta dampak

# Permasalahan yang ditemui

Pada implementasi sistem informasi desa yang sedang berjalan ditemukan permasalahan salah satunya minimnya pengetahuan perangkat desa dalam melakukan pengelolaan website desa sebagai sarana dari sistem informasi desa dan beberapa informasi data milik desa yang tidak valid, dimana pada permasalahan yang disebutkan menghambat terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik dari pemerintah desa.



No	Tujuan SID	Uraian	Realisasi	Keterangan
1.	Pemetaan kondisi dan Potensi desa	- Pemetaan kondisi desa - Potensi yang dimiliki desa	√ -	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terealisasi namun, Profil wilayah yang terdapat pada SID tidak sesuai, serta peta wilayah desa dukuh Sari yang tidak sesuai dengan titik.</li><li>• Pada SID tidak menjelaskan tentang potensi desa yang dimiliki.</li></ul>
2.	Memperkuat kualitas pelayanan	- Pelayanan Administrasi - Pelayanan Barang - Pelayanan Jasa - Pelayanan Regulatorif	√ - - √	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terealisasi akan tetapi tidak sesuai, karena pada website terdapat data desa lain.</li><li>• Tidak terealisasi</li><li>• Tidak terealisasi</li><li>• Terealisasi</li></ul>
3.	Memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan desa	- APBD - RKP - PAK - Progam Kerja	√ √ √ √	Terealisasi

Pada tabel disamping diketahui bahwa pada implementasi SID seperti profil wilayah pada website SID tidak sesuai titik lokasi dengan benar, tidak dijelaskannya potensi desa pada SID, campur aduknya data desa satu dengan desa yang lain. terdapat beberapa hambatan pada realisasi yang sudah dijelaskan membuat SID tidak berjalan dengan maksimal.

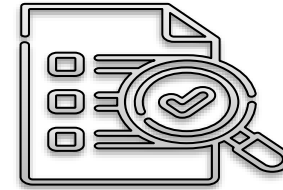
# METODE

## Jenis Penelitian



Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif

## Fokus Penelitian



Implementasi Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa Dukuhsari dengan indikator menurut George Edward III terdapat empat variabel krusial untuk implementasi kebijakan dapat efektif,

### **Empat variabel krusial untuk implementasi kebijakan menurut George Edward III :**



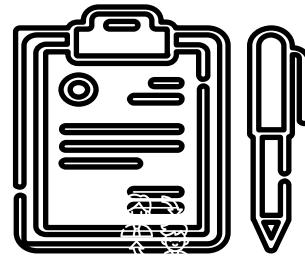
- Komunikasi, kebijakan yang di komunikasikan pada organisasi publik.
- Sumber Daya, kebijakan yang tersedia berupa tenaga pendukung berasal dari sumber daya manusia.
- Disposisi, bagaimana kesiapan sikap yang berasal dari implementator yang nantinya dapat cepat mengeluarkan suatu kebijakan publik yang disebutkan
- Struktur Birokrasi, penyesuaian pada suatu organisasi birokrasi dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan publik.

# METODE

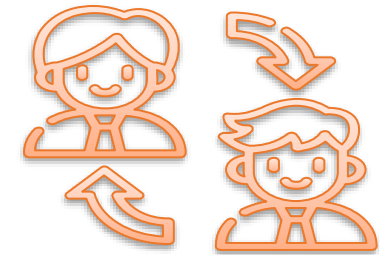


## Lokasi Penelitian

Balai Desa Dukusari Kecamatan  
Jabon



**Teknik Pengumpulan Data**  
Wawancara, Observasi, dan  
Dokumentasi



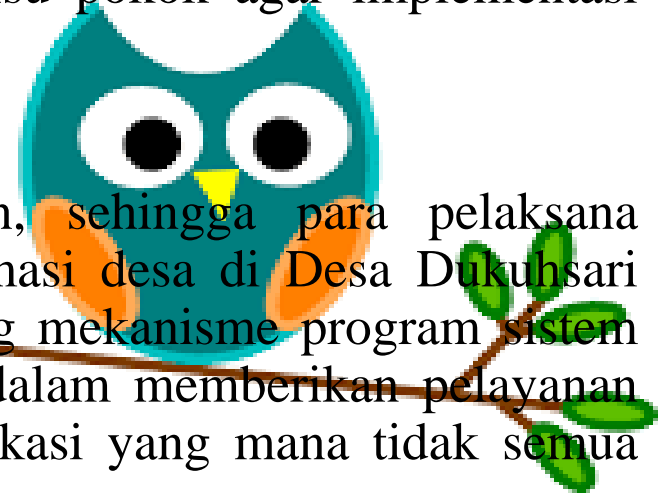
**Teknik Penentuan Informan**  
Teknik Purposive Sampling

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon. Dalam Implementasi Kebijakan Publik Model Edward. George Edward III menegaskan bahwa terdapat empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu :

## ❑ *Communication* (Komunikasi)

- Transmisi, berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut. Sebagai pelaksana implementasi sistem informasi desa di Desa Dukuhsari pegawai menyatakan kurangnya kesiapan dan informasi yang memadai tentang mekanisme program sistem informasi desa yang dijalankan, hal ini membuat pegawai kurang maksimal dalam memberikan pelayanan berupa informasi yang dibutuhkan oleh warga setempat melalui berbagai aplikasi yang mana tidak semua pegawai dapat menguasai.
- Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Dari informasi yang diperoleh dilapangan para implementator menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan website sistem informasi desa ini sesuai dengan apa yang mereka ketahui yang dimana informasi didapatkan dari dua kali pertemuan sosialisasi yang diselenggarakan tentang mekanisme sistem informasi desa sejak aplikasi mulai di jalankan.



# HASIL DAN PEMBAHASAN

- Kejelasan, berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi dari kebijakan tersebut.

Data Demografi Berdasar Populasi  
Per Wilayah

No	Dusun	RW	RT	Nama Kep
1	KERANDANGAN			
2		-	002	
3			001	
4			004	
5			006	
6	LOCO			
7		-	003	

Berdasarkan Gambar disamping menunjukkan bahwa ketidaklengkapan data demografis per wilayah pada laman Sistem Informasi Desa pada Desa Dukuhsari. Diketahui bahwa pengelola yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami tentang tatacara dan cara merubah data sebelumnya dan kurangnya data yang hendak dipublikasikan.

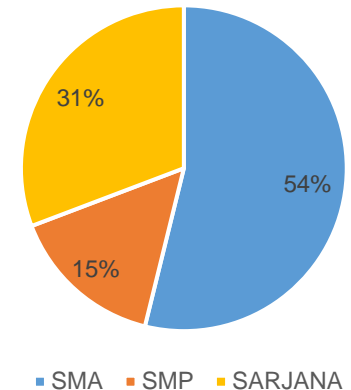


## Resource (Sumber Daya)

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung dimana kedudukan sumber daya dalam implementasi kebijakan tak kalah penting, ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat ketidakefektifan pada proses kebijakan yang dijalankan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

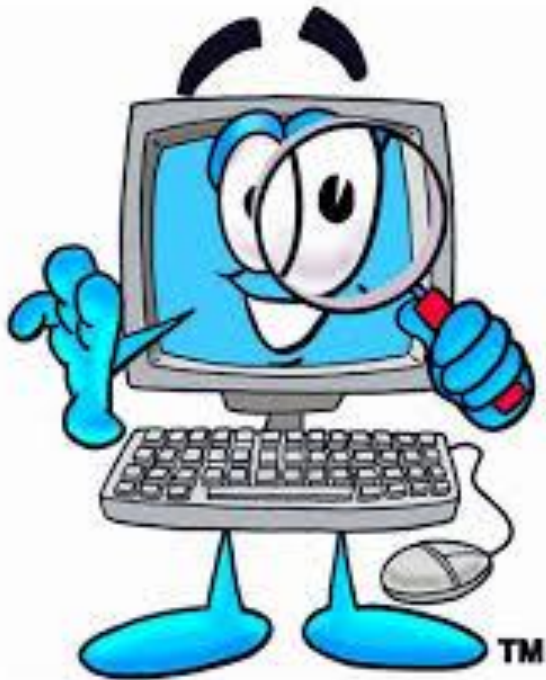
Berdasarkan diagram 1 disamping menunjukkan bahwa dari segi tingkat pendidikan masing-masing pemerintah desa, pendidikan terakhir yang ditempuh ialah bangku pendidikan SMA sebesar 54% yang bahkan ada 15% yang hanya menempuh pendidikan SMP pada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pegawai pemerintah Desa Dukuhsari dapat menguasai pelayanan berbasis website dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi/media elektronik.



## *Disposition* (Disposisi)

Disposisi merupakan bagian dari sikap pelaksana kebijakan, yaitu agar kebijakan itu efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui kebijakan tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya. Informasi yang didapat dari hasil wawancara pada perangkat desa menunjukkan bahwa para pelaksana cukup antusias, khususnya perangkat desa sebagai pengelola sistem informasi desa sangat mendukung arti pentingnya kemudahan dalam memberikan pelayanan berbasis website dengan memanfaatkannya sarana media elektronik bagi penyebaran informasi seputar Desa Dukuhsari.

# HASIL DAN PEMBAHASAN



## □ *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi diantara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementator kebijakan. Hasil wawancara informan pada implementasi sistem informasi desa terkait dengan struktur organisasi dalam pemerintahan Desa Dukuhsari sudah terjalin koordinasi antara kerja sama yang baik di tiap unsur, baik dari Pemerintah kabupaten, pihak kecamatan maupun aparatur desa. Hal ini ditinjau dari program yang sedang dijalankan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa aspek lain yang perlu dimaksimalkan.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dapat diambil kesimpulan dari peneliti sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Pada Pemerintah Desa Dukhsari ditinjau dari ke empat variabel sebagai pengukurannya yakni : Komunikasi (Communication), Sumber Daya (Resource), Disposisi (Dispotition), dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).

Implementasi Sistem Informasi Desa pada Pemerintah Desa Dukuhsari belum berjalan secara maksimal. Ditinjau dari aspek komunikasi bahwa kurangnya kesiapan dan pemahaman informasi mengenai mekanisme penggunaan aplikasi bagi pelaku sumber daya sebagai pengelola website. Dari aspek Sumber daya sudah berjalan cukup baik, pemenuhan sumber daya untuk implementasi Sistem Informasi Desa sudah tercukupi walaupun masih adanya informasi yang dipublikasikan belum sepenuhnya lengkap yang dimana perlu adanya penguatan dan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah Daerah. Terkait Disposisi berjalan dengan baik karena komitmen antar pihak yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. Dalam Struktur Birokrasi koordinasi dari pihak penyelenggara hingga pelaksana ke pemerintah desa berjalan dengan baik sehingga implementasi sistem informasi dapat dijalankan meski terdapat beberapa aspek yang kurang maksimal.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO



# TERIMA KASIH